

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan pada demokrasi, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal itu terlihat dengan pemilihan umum dimana rakyat memilih secara langsung wakil rakyat yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai periode yang berlaku. Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPRD, DPD hingga pemilihan Kepala Daerah juga di laksanakan secara langsung dan demokratis. Di Indonesia sistem ini disebut dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata penting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih pada Negara berbentuk Republik seperti Indonesia. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Sistem pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilih dituntut cerdas untuk bisa memilih dan menilai dengan baik dan cermat siapa wakil rakyat yang pantas dan bisa memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilih haruslah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu.

Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Kusmanto, 2013).

Partisipasi politik dalam pemilihan umum sangat diperlukan karena partisipasi politik merupakan kebutuhan masyarakat secara universal akan dapat terwujud dan keikutsertaan masyarakat dalam politik akan dapat mewujudkan kepentingan umum.

Menurut Dinata (2015)

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi (Pemilihan Umum). Semakin tinggi

Partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya Partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan oleh KPU yang ditugaskan untuk mengatur pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Proses yang tepat dari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak bisa hanya dilihat oleh cara kerja KPU, tetapi harus diikuti oleh kesadaran dan partisipasi publik. Tingkat partisipasi publik dipengaruhi oleh bagaimana KPU memimpin masyarakat, yang memberi pengaruh pada hasil pemilihan Walikota (Pebriyenni dkk, 2018).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi serta pengetahuan yang baik dalam pemilu akan dapat mewujudkan suatu pemilihan yang berkualitas. Hal itu terutama bagi khalayak pemilih pemula, yang diasumsikan dari golongan remaja yang karena usia baru bisa memilih.

Abadi (2016) Pemilih pemula adalah konstituen atau anggota masyarakat yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Wardhani (2018)

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar pragmatisme.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk pemahaman berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tidak terjadinya golongan putih (golput).

Dari hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 5 November 2018 di kantor KPU Kota Padang. Jumlah pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 yang ada di Kelurahan Pasar ambacang, Kecamatan Kuranji Padang tercatat sebanyak 1.377 orang pemilih pemula dari 10.893 orang pemilih. Dari data yang diperoleh terdapat pemilih pemula tingkat SMA/SMK/MA berjumlah 616 orang pemilih. Pemilih pemula tingkat Mahasiswa berjumlah 761 orang pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudari Rafni salah seorang pemilih pemula di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa :

Dalam pemilihan Walikota Padang pada tanggal 27 Juni tahun 2018 saya ikut serta berpartisipasi mengeluarkan hak suara, bukan dalam hal berpartisipasi dalam kegiatan kampanye namun dalam mengeluarkan hak suara untuk menentukan Walikota Padang pada periode berikutnya. Sebelumnya saya tidak mendapatkan suatu sosialisasi politik dalam hal mengenalkan siapakah itu pasangan calon yang akan dipilih ataupun hal-hal mengenai pelaksanaan pemilihan Walikota Padang, namun saya sebagai pemilih pemula tetap menggunakan hak pilih saya dan ini merupakan pertama kalinya saya ikut memilih, meskipun saya tidak faham dengan calon-calon yang akan dipilih. Saya tidak mau tergolong pada golongan putih (Golput), karena menurut saya satu hak suara menentukan jalannya pemerintahan kita kedepannya, tentunya kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, kurangnya sosialisasi politik yang diperoleh oleh pemilih pemula, serta kurangnya pengetahuan pemilih pemula terhadap pasangan calon Walikota Padang yang akan dipilih. Ketika para pemilih pemula tidak mengetahui informasi yang tepat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, khususnya partisipasi politik mereka dalam mengikuti pemilihan Walikota Padang tahun 2018.

Pemilih pemula dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk ditempat tinggal mereka, khususnya di dalam keluarga dan orang tua (Rachmat, 2016).

Pemilih pemula yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe apatis mereka. Tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya

pemilih pemula yang dilatarbelakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Kurang pemahamannya pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilu, pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti anggota keluarga mulai dari orang tua hingga kerabat dan masih kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh KPU selaku penyelenggara untuk merangsang partisipasi pemilih pemula (Wardhani, 2018).

Kurangnya pemahaman masyarakat pemilih pemula terhadap partisipasi politik, kurangnya pendidikan politik yang didapat oleh pemilih pemula dan pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh keluarga atau orang terdekat. Selain itu, ada pula ketidakpercayaan masyarakat pemilih pemula terhadap calon yang akan dipilih.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota Padang Tahun 2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat pemilih pemula terhadap partisipasi politik di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.

3. Ketidakpercayaan masyarakat pemilih pemula terhadap kebijakan kepala daerah di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.
4. Ketidakpercayaan masyarakat pemilih pemula terhadap calon yang akan dipilih.
5. Pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lain.
- b. Untuk menambah pengetahuan penelitian tentang bentuk partisipasi politik pemilih pemula.

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi partai politik, masyarakat, terutama untuk pemilih pemula agar dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis serta berkualitas.
- b. Penelitian ini juga bisa menjadi informasi bagi pemerintah Kota Padang beserta partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pemilih pemula